



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak kota Pekanbaru.

Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Pekanbaru adalah variabel kewajiban kepemilikan NPWP daripada variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak yang paling tinggi

5.2 Keterbatasan Penulis

Pada penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian kedepannya. Adapun keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah populasi dalam penelitian yang digunakan masih terlalu sedikit yaitu hanya pada satu KPP Pratama Pekanbaru.

5.3 Implikasi

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang kewajiban kepemilikan

NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat khususnya wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP diharapkan akan meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kerja sama antara petugas pajak dan masyarakat. Petugas pajak harus lebih teliti atau jeli dalam menemukan potensi-potensi pajak sedangkan masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan belum mempunyai NPWP, diharapkan mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak.

Apabila wajib pajak yang terdaftar lalai dalam melaksanakan kewajibannya seperti mempunyai hutang pajak atau menunggak pembayaran pajaknya, maka petugas pajak dapat mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi hutang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa pajak dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas atas hasil kerjanya. Dalam hal ini seberapa banyak pemeriksa pajak telah menerbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari hasil pemeriksaannya tersebut, dan dari SKP tersebut seberapa banyak tunggakan atau utang pajak yang dapat ditagih atau dicairkan. Jika SKP yang diterbitkan semakin banyak, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan dirjen pajak sebaiknya lebih memperhatikan kualitas dari pemeriksaan yang objektif dan pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penerimaan pajak, maka dari itu diharapkan bagi aparat perpajakan untuk dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan antara lain dengan cara penambahan jumlah petugas pajak yang melakukan pemeriksaan pajak dan peningkatan kuantitas dan kualitas mereka secara teknis baik secara akuntansi maupun mengenai peraturan perpajakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma yang mengatur seorang pemeriksa pajak, agar tidak terjadi pemeriksaan yang bermasalah. Karena apabila terdapat pemeriksaan yang bermasalah, biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan penagihan yang bermasalah, KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan selalu mengevaluasi terhadap semua faktor-faktor pemeriksaan dan penagihan pajak secara berkala dengan pengawasan yang baik.

Penagihan pajak dilakukan dengan mencairkan tunggakan pajak yang tinggi, maka penerimaan pajak yang dihasilkan oleh negara pun akan semakin meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam penagihan pajak, fiskus sebaiknya lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih sukarela dalam memenuhi kewajibannya, dan diharapkan segera mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melakukan reformasi perubahan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas dan moral aparat pajak agar tercipta fiskus yang profesional, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikannya. Sehingga dapat membantu para fiskus dalam mengidentifikasi pajak terhutang wajib pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dapat diminimalisasi.

5.4 Saran

Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Pekanbaru maka perlu adanya peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan demikian peneliti akan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Penelitian ini hanya menggunakan 98 sample dan satu KPP Pratama. Oleh karena itu penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dan menggunakan lebih banyak sample.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

